

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelaparan merupakan masalah genting yang masih menjadi tantangan bagi beberapa Negara di dunia. Isu kelaparan sering kali dikaitkan dengan Negara Negara di benua Afrika. Burundi adalah Negara termiskin di Afrika yang menghadapi masalah kelaparan serius. kelaparan timbul saat tubuh tidak mendapatkan asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Masalah kelaparan menjadi serius ketika suatu Negara mengalami krisis bahan pangan yang merupakan kebutuhan primer. Burundi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bank Dunia, merupakan negara dengan tingkat kemiskinan yang paling ekstrem di dunia, dengan pendapatan nasional bruto yang mencapai sekitar 270 dolar AS atau setara dengan Rp 4 juta per tahun. Secara administratif, Burundi terdiri dari 17 provinsi. Wilayah geografisnya tidak memiliki akses ke laut karena terletak di tengah-tengah daratan. Batas-batas negara ini melibatkan Rwanda di bagian utara, sementara di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Tanzania. Di barat daya, terdapat perbatasan dengan Danau Tanganyika, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2019, populasi penduduk Burundi mencapai 11,5 juta jiwa, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,8 juta jiwa pada tahun 2020 (*Burundi Population 2023 (Live)*, n.d.). Akan tetapi sebanyak 70% penduduk Burundi hidup dalam kemiskinan dan membuat tingginya angka gizi buruk (Pristiandaru, 2023). Masalah kelaparan di Burundi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang cepat, kondisi iklim, konflik antar etnis dan kurangnya akses terhadap sumber pangan dan air bersih (*Burundi, World Food Programme*, 2023).



Gambar 1. 1 Peta Burundi

Kondisi iklim yang berubah berpengaruh pada masyarakat Burundi yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian subsisten. Sehingga perubahan iklim akan berdampak pada produktivitas pertanian yang dapat memperburuk masalah kelaparan di Burundi. Keterbatasan ketersediaan pangan di Burundi sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat ekstrem. Fluktuasi tak terduga dalam pola cuaca, mulai dari musim hujan hingga musim kemarau, memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat di negara tersebut. Tingginya jumlah pengungsi akibat banjir, yang merupakan salah satu hasil dari perubahan iklim ini, menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil panen dan menimbulkan kekhawatiran atas keterbatasan pangan yang bersifat jangka panjang di Burundi. Masalah kelaparan di Burundi terus meningkat dan bertambah buruk setiap tahun (Syahrianto, 2023).

Masalah kelaparan juga dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di Burundi. Burundi sebenarnya merupakan Negara yang berkonflik sejak tahun 1987. Berawal dari adanya perebutan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antara 2 suku terbesar di Burundi yaitu suku Hutu dan suku Tutsi. Kecemburuan sosial itu terjadi karena kursi pemerintahan mayoritas diduduki oleh suku Tutsi. Pada masa itu presiden yang menjabat adalah Pierre Buyoya yang merupakan orang suku Tutsi. Perebutan kekuasaan akhirnya menjadi awal dari adanya konflik suku

berkepanjangan di Burundi hingga terjadi pembantaian yang menewaskan banyak orang dari suku Hutu. Konflik ini disebut sebagai perang 12 tahun yang sudah berakhir pada tahun 2005. Pada awal tahun 2015, presiden yang menjabat di Burundi yaitu presiden Pierre Nkurunziza membuat Burundi heboh karena memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga. Keputusan yang diambil oleh presiden Pierre ini dianggap tidak demokratis karena melanggar konstitusi Negara yang menetapkan bahwa masa jabatan maksimal presiden adalah dua tahun. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik antara pendukung presiden Pierre dan oposisi yang kemudian memicu aksi protes dikalangan masyarakat sipil (Ardiansyah, 2015).

Pada tahun 2015 tepatnya pada 26 april, sehari setelah presiden Pierre mencalonkan diri sebagai presiden tiga periode aksi protes pecah di Bujumbura, ibu kota Burundi. Ribuan demonstran turun kejalan di Bujumbura untuk menggelar aksi protes pencalonan presiden periode ketiga. Saat itu, kondisi sangat ricuh dan membuat polisi Burundi juga turut menembakkan peluru tajam ke udara untuk membubarkan para demonstran. Namun, aksi polisi Burundi justru membuat demonstran makin rusuh. Para demonstran membalas dengan melempari polisi dengan batu dan membakar ban. Aksi ini dibalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru tajam oleh polisi Burundi. Para demonstran mengancam jika pencalonan presiden periode ketiga tetap dilakukan, kesepakatan damai yang mengakhiri perang saudara 12 tahun pada 2005 akan diakhiri. Pierre juga memperingatkan semua orang bahwa siapa pun yang ingin membuat masalah dengan partai berkuasa yang dipilih oleh rakyat, dia juga akan berada dalam masalah. Konflik ini memakan 300.000 korban luka-luka dan sedikitnya 100 korban jiwa (BBC News, 2015). Konflik ini masih terus berlanjut hingga pertengahan bulan Juli 2015 disebutkan bahwa terdapat lebih dari 12.000 jiwa mengungsi ke Negara tetangga. Kerusuhan yang terjadi di Burundi menyebabkan masyarakatnya banyak kehilangan pekerjaan kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini menyebabkan menurunnya

produksi pertanian dan distribusi makanan menjadi terhambat (Amnesty International, 2021).

Faktor selanjutnya yang menimbulkan masalah kelaparan yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Berdasarkan data dari *World Population Review* disebutkan bahwa populasi di Burundi meningkat dengan cepat yaitu sebesar 3,12% sehingga angka populasi Burundi dari tahun 2019-2020 meningkat sebanyak lebih dari 360.000 jiwa. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat kesuburan wanita dan angka kelahiran yang tinggi. Hampir semua wanita di Burundi menikah di usia dini dan memiliki anak dengan jumlah antara 3 sampai 7 anak dan mereka hidup dalam kemiskinan. Tingkat kekurangan gizi di Burundi juga cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Menurut data tahun 2020, sekitar 52% anak yang berusia di bawah 5 tahun mengalami *stunting*. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 4% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 56%. Beberapa penyakit serius seperti malaria, campak, influenza, dan diare merupakan faktor penyebab utama kematian di Burundi (<https://www.youtube.com/watch?v=JW5o1G5wNbU>).

Sayangnya, mayoritas penduduk Burundi menyadari kondisi kelaparan yang mereka alami, namun kurang menyadari bahwa mereka mengalami malnutrisi. Hal ini menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam tingkat gizi buruk. Permasalahan kelaparan ini menjadi sangat penting bagi aktor-aktor yang berkomitmen dalam upaya pemberantasan kelaparan, mengingat deklarasi hak asasi manusia PBB Pasal 25 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai bagi Kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan, perumahan dan perawatan Kesehatan serta pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, janda, usia tua, atau kekurangan penghidupan lainnya dalam keadaan diluar kendalinya” (Worldwide, 2022).

Sejak 2015-2018, setelah pecahnya kericuhan di Burundi, masalah kelaparan kian meningkat seiring dengan munculnya masalah masalah baru

yang berkaitan dengan kericuhan. Disebutkan bahwa sebanyak 100.000 orang untuk pertama kalinya meninggalkan rumah mereka pada Mei 2015. Masalah kelaparan yang sudah sangat serius di Burundi mendorong organisasi internasional untuk mengupayakan solusi dari masalah kelaparan. Salah satu organisasi internasional yang aktif adalah World Food Programme (WFP), merupakan bagian dari program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi kondisi darurat pangan di Burundi. WFP merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh PBB di bawah koordinasi Food and Agriculture Organization pada tahun 1961. Fokus utama WFP adalah sebagai organisasi internasional yang menangani isu-isu krisis pangan di seluruh dunia, prinsip ini tercermin dalam nilai-nilai dan prinsip yang diakui oleh WFP, lalu diwujudkan melalui semboyan "Zero World Hunger." Hal ini sejalan dengan pencapaian poin kedua dalam Sustainable Development Goals (SDGs). WFP berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dunia.

Pada proses pembentukannya, PBB melakukan peninjauan terhadap WFP selama tiga tahun. Hal ini dikarenakan penciptaan WFP mulanya hanya sebagai percobaan saja untuk memberikan makanan dalam rangka mengatasi masalah pangan di dunia melalui sistem PBB. World Food Programme (WFP) secara resmi terbentuk melalui gabungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Food and Agriculture Organization (FAO) dengan misi untuk mengakhiri kelaparan di seluruh dunia. Fokus utama organisasi ini adalah memberikan bantuan pangan sebagai upaya untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi, memberikan dukungan kepada pengungsi yang rentan dalam situasi darurat, serta mendorong ketahanan pangan global, sesuai dengan mandat PBB terhadap FAO.

Pada tahun 1960, presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower, mengusulkan pembentukan program pangan di bawah naungan PBB kepada Majelis Umum PBB. WFP sebagai organisasi di bawah

naungan PBB, tidak menerima alokasi dana langsung dari PBB. Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis pangan di negara-negara yang mengalami konflik, WFP mengandalkan bantuan keuangan dari negara-negara anggota WFP. Selain itu, organisasi ini menghimpun dana melalui donasi yang diterima melalui situs web resmi mereka. Dalam upaya memperoleh dukungan finansial, WFP mengandalkan sumbangan dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, sektor swasta, dan individu (Rumbia, 2022).



Gambar 1. 2 Logo World Food Programme

Kemunculan WFP ini dilatar belakangi oleh adanya bencana alam yang terjadi di beberapa negara, saat itu WFP menjalankan programnya Ketika daerah Boein Zahra, di Iran Utara mengalami gempa bumi yang menyebabkan 12.000 jiwa meninggal dan ribuan rumah hancur. Setelah itu disusul dengan terjadinya angin topan yang melanda Thailand dan beberapa bencana di daerah lainnya. Setelah itu, krisis pangan mulai menjadi fokus WFP karena Krisis mulai terjadi dan memburuk selama bertahun-tahun juga terjadinya pemerataan kelaparan yang mematikan. Tidak hanya pada bencana alam, WFP juga bergerak saat adanya konflik seperti yang terjadi di Burundi. Melalui programnya, World Food Programme (WFP) menghadirkan akses terhadap pangan dengan menyediakan bantuan pangan tanpa persyaratan kepada pengungsi, rumah tangga yang rentan terhadap kekurangan pangan, dan pengungsi yang telah kembali ke Burundi. WFP sebagai organisasi internasional berperan secara signifikan dalam

penanggulangan masalah kelaparan di Burundi, yang dipicu oleh sejumlah faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. WFP juga berupaya meningkatkan akses pada teknologi pertanian guna mendukung pengembangan kapasitas para petani.

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih dalam bagaimana peran WFP dalam mengatasi masalah kelaparan di Burundi serta kendala apa saja yang dihadapi oleh WFP saat memainkan perannya sebagai organisasi yang mengusahakan ketahanan pangan di negara-negara yang mengalami darurat pangan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran WFP untuk mengatasi masalah kelaparan di Burundi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu : Bagaimana peran World Food Programme dalam mengatasi masalah kelaparan di Burundi?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu memahami dan mengetahui tentang peran WFP dalam menyelesaikan masalah kelaparan di Burundi, maka kerangka dasar berpikir yang akan digunakan adalah konsep Organisasi Internasional dan konsep Ketahanan Pangan.

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional memegang peran penting dalam membentuk hubungan kerja sama guna membantu negara-negara dalam menyelesaikan permasalahan internalnya. Keterlibatan dalam organisasi internasional menjadi semakin vital bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya, karena memudahkan mereka untuk merumuskan kebijakan yang sesuai atau sejalan dengan koordinasi antarnegara anggotanya. Menurut perspektif dari Teuku May Rudy, konsep Organisasi Internasional merupakan suatu pola

kerja sama yang melibatkan negara-negara lintas batas, didasarkan pada struktur organisasi yang jelas dan komprehensif. Organisasi internasional diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan dan terstruktur, dengan tujuan mewujudkan sasaran yang diperlukan dan disepakati bersama antara pemerintah dan antara kelompok non-pemerintah di berbagai negara (Teuku, May Rudy, 2005).

Organisasi internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Inter Governmental Organization (IGO) dan Non-Governmental Organization (NGO). NGO, atau organisasi non-pemerintah, merujuk pada kelompok swasta yang beroperasi di berbagai sektor seperti ekonomi, kebudayaan, dan lingkungan. Di sisi lain, IGO adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. IGO ditandai dengan pembentukannya melibatkan dua negara atau lebih, penyelenggaraan pertemuan secara rutin, memiliki struktur yang permanen, dan keanggotaannya bersifat sukarela.

Perspektif lain disampaikan oleh Clive Archer, yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur formal berkelanjutan yang terbentuk melalui perjanjian atau kesepakatan antara anggotanya, yang melibatkan dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Archer juga menyoroti bahwa organisasi internasional yang beroperasi berdasarkan prinsip untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia (Archer, 2014). Organisasi internasional seperti *World Food Programme* (WFP) dapat diklasifikasikan sesuai dengan konsep pemikiran Clive Archer, mengingat tujuannya yang bersifat umum dengan maksud terbatas (*general membership and limited purpose*). WFP memiliki fokus khusus pada bidang tertentu dan membuka kesempatan keanggotaan bagi seluruh negara, tanpa pembatasan pada kelompok negara tertentu. Sebagai badan yang beroperasi dalam kerangka PBB, WFP tidak membatasi jumlah anggotanya dan memiliki tujuan spesifik untuk menyediakan

bantuan pangan global serta mendukung negara-negara dalam mencapai ketahanan pangan, sesuai mandat dari *World Food Summit*.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dan peran-perannya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori peran dalam sistem internasional. Tiga peran tersebut yang digunakan untuk menggambarkan fungsi organisasi internasional dalam suatu negara. Berikut adalah ketiga perannya:

- a. *Instrument*, Konsepsi organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional tidak selalu bertujuan untuk memenuhi seluruh kepentingan anggotanya. Pembentukan organisasi internasional membawa implikasi bahwa di antara negara-negara, suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumen untuk mengatur secara multilateral aktivitas negara-negara dalam suatu ruang lingkup tertentu.
- b. *Arena*, Organisasi internasional berfungsi sebagai arena atau forum yang bersifat netral dalam menetapkan tujuan organisasi. Fungsi ini bertujuan untuk menjadi tempat pertemuan bagi anggotanya, memfasilitasi diskusi dan pembahasan mengenai berbagai masalah yang dihadapi. Beberapa negara sering menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk mengangkat isu-isu di dalam negerinya atau masalah negara lain, dengan harapan mendapatkan perhatian internasional.
- c. *Actor*, Organisasi internasional memiliki sifat independen, di mana keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, atau tekanan dari luar organisasi. Sebagai aktor independen, organisasi internasional mampu membuat keputusan sendiri tanpa terpengaruh oleh kekuatan atau tekanan dari pihak luar organisasi.

Dalam hal ini, WFP sebagai organisasi internasional berperan sebagai *Instrument*, dimana WFP dalam menjalankan program berdasarkan hasil keputusan dewan eksekutif yang terdiri dari 36 negara anggota yang

memberikan dukungan antar pemerintah, arahan dan pengawasan kegiatan WFP. Hal ini juga terlihat dari visi WFP yaitu *“The world in which every man, woman and child has access all the time to the food needed for an active and healthy life”*. Selain itu, dalam menangani masalah kelaparan, WFP berperan sebagai arena, dimana sebelum menjalankan programnya, WFP menjadi tempat bagi negara-negara untuk berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan. Kemudian WFP juga berperan sebagai actor dimana WFP melaksanakan program mengentaskan kelaparan dan ketahanan pangan tanpa dipengaruhi oleh halangan dari kekuatan diluar organisasi. WFP juga membuat keputusan untuk menjalankan program kerja. WFP secara rutin memberikan bantuan berupa makanan untuk membantu masyarakat Burundi yang terkena dampak perubahan kondisi iklim dan kemiskinan.

2. Konsep Ketahanan Pangan

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat merupakan salah satu hak manusia. Sesuai dengan Deklarasi Roma tahun 1996. Deklarasi Roma merupakan hasil dari konferensi tingkat tinggi Pangan Dunia yang membahas tentang ketahanan pangan dunia dan rencana tindak lanjut KTT Pangan Dunia. Deklarasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan pangan di seluruh dunia dengan meningkatkan produksi pangan, mengurangi kerentanan pangan, dan meningkatkan aksesibilitas pangan. Sebagai elemen esensial dan hak asasi manusia, pangan memiliki makna dan peran yang signifikan dalam kehidupan suatu bangsa. Burundi merupakan negara di Afrika Sub-Sahara yang menduduki peringkat ke-15 dari 19 negara dengan penghasilan yang rendah untuk skor ketahanan pangan (*Global Food Security Index (GFSI)*, n.d.). Ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan yang terbatas dan kebutuhan yang meningkat dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Gangguan pada ketahanan pangan dapat menghasilkan berbagai

konsekuensi sosial dan politik yang merugikan, bahkan dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kestabilan nasional (Badan Urusan Logistik, 1997).

Konsep ketahanan pangan adalah sebuah konsep yang melihat kemampuan suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya secara berkelanjutan dan merata. Maxwell dan Smith mengungkapkan bahwa ketahanan pangan mencerminkan kemampuan setiap individu untuk memperoleh akses ke pangan sesuai kebutuhan mereka, pada setiap waktu yang diperlukan. Konsep ketahanan pangan sangat penting dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan suatu negara atau wilayah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi bagi penduduknya secara berkelanjutan dan merata. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) Definisi ketahanan pangan yang diakui dalam World Food Summit 1996 merujuk pada kondisi di mana semua individu memiliki akses yang memadai secara fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bernutrisi, sesuai dengan kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kehidupan yang aktif dan sehat. Definisi ini menyoroti sifat multidimensi ketahanan pangan, mencakup aspek akses pangan, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan. Dimensi ketahanan pangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan dan gizi suatu negara atau wilayah, serta untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Lestari et al., 2018).

Dalam konsep ketahanan pangan, Menurut FAO terdapat beberapa dimensi, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan, Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Tersedianya pangan secara memadai dan merata mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan

dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup dapat diukur dari produksi pangan dalam negeri, impor, dan stok pangan.

- b. Aksesibilitas pangan, Aksesibilitas pangan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Aksesibilitas pangan yang merata dan terjangkau menjadi faktor penting dalam konsep ketahanan pangan. Aksesibilitas pangan dapat diukur dari akses terhadap pangan, harga pangan, dan pendapatan. Harga pangan yang terjangkau dan stabil juga menjadi faktor penting dalam aksesibilitas pangan. Oleh karena itu, aksesibilitas pangan yang merata dan terjangkau sangat penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kualitas dan keamanan pangan, Kualitas pangan mencakup kualitas nutrisi dan keamanan pangan, Kualitas nutrisi pangan berkaitan dengan kandungan nutrisi yang terdapat dalam pangan, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Keamanan pangan berkaitan dengan keamanan dari segi kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, kualitas dan keamanan pangan menjadi faktor penting dalam konsep ketahanan pangan, karena dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Sumber daya pangan, Sumber daya pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang digunakan untuk memproduksi pangan, seperti lahan, air, bibit/benih, pupuk/pakan, dan hama/penyakit. Sumber daya pangan menjadi faktor penting dalam konsep ketahanan pangan, karena dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan. Hal ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan suatu negara atau wilayah untuk menjaga dan mengelola sumber daya pangan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, WFP berperan membantu pemerintah Burundi untuk mencapai dimensi kualitas dan keamanan pangan dengan programnya yaitu untuk mengurangi angka malnutrisi anak usia di bawah 5 tahun. WFP

terlibat dalam memberikan bantuan pangan darurat kepada kelompok-kelompok yang rentan di Burundi. Melalui distribusi makanan, suplemen gizi, dan program pemulihan gizi, WFP membantu mengurangi risiko kelaparan akut dan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil atau menyusui. WFP bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan jangka panjang di Burundi. WFP mendukung untuk memulihkan infrastruktur pertanian, pengadaan alat dan peralatan pertanian, serta pelatihan dalam manajemen risiko bencana dan penanggulangan perubahan iklim.

D. Argumentasi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, argumentasi mengenai peran World Food Programme (WFP) dalam penanggulangan masalah kelaparan di Burundi berdasarkan teori Organisasi Internasional sesuai perspektif Clive Archer, penyelesaian masalah kelaparan di Burundi dapat dilakukan dengan menjalankan tiga peran dari Organisasi Internasional. Pertama, WFP berperan sebagai instrument yang digunakan oleh negara-negara atau pihak-pihak terlibat untuk mencapai tujuan bersama atau menangani masalah bersama. Kedua, WFP menjadi arena bagi anatar negara atau mitra untuk berbagi informasi, mengevaluasi kebutuhan bantuan pangan Ketiga, WFP juga berperan sebagai actor yang bertindak sebagai pelaksana utama program bantuan. Disamping itu, dalam upaya menjaga ketahanan pangan, WFP memastikan adanya persediaan pangan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, dan melakukan pelatihan dan edukasi terkait sumber pangan hasil pertanian sesuai dengan konsep ketahanan pangan menurut FAO.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan argumentasi diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran World Food Programme (WFP) sebagai aktor organisasi

internasional dalam menangani masalah kelaparan di Burundi, dengan fokus pada krisis makanan dan ketahanan pangan. Penelitian ini akan menganalisis kontribusi konkret yang dilakukan oleh WFP dalam menjawab tantangan kelaparan di negara tersebut.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengimplikasikan penguraian fakta berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini memanfaatkan data dari studi kepustakaan, mengandalkan sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, situs internet, berita daring, dan berbagai sumber lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ini.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dan menghindari ketidakfokusan dalam pembahasan, maka penulis hanya berfokus pada peran WFP dalam menangani masalah kelaparan di Burundi sebagai aktor organisasi internasional yang berfokus pada krisis makanan dan ketahanan pangan dari rentang waktu 2015-2018. Dimana pada tahun 2015 situasi memanas karena adanya isu pencalonan presiden tiga periode yang menyebabkan adanya konflik. Konflik ini banyak memakan korban dan kemudian menjadi lebih parah saat dikaitkan dengan perang saudara 12 tahun. Pada pertengahan 2015, setelah Pierre kembali menjadi presiden, sekelompok perwira militer melakukan kudeta. Namun upaya kudeta tidak berhasil dan malah memperburuk situasi politik dan kemananan Burundi. Selama tahun 2016 hingga tahun 2017, kelompok bersenjata yang bekerjasama dengan oposisi maupun pemerintah saling bentrok dan membuat warga sipil menjadi korban dari bentrok tersebut. Bentrok yang terjadi dianggap sebagai pelanggaran HAM karena serangan terhadap aktivis dan media independen meningkat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Burundi mencari suaka yang lebih aman di negara tetangga.

Hingga pada tahun 2018, pemerintah Burundi dan beberapa kelompok oposisi melakukan proses perdamaian di bawah mediasi Uni Afrika.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematikan penulisan.
- BAB II Membahas tentang keterlibatan WFP dalam penanganan isu kelaparan saat terjadi konflik sosio-politik di Burundi.
- BAB III Berisi tentang peran WFP dalam mengatasi masalah kelaparan di Burundi, sasaran penerima bantuan dan tantangan serta hambatannya.
- BAB IV Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.